

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen penilai prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya kadar keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kinerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajiban terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Cara untuk mengetahui baik buruknya kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dapat diketahui dengan cara menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan.

Sama halnya dengan perusahaan pada umumnya, koperasi juga memerlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi agar manajemen pihak koperasi dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan

baik sesuai dengan tujuan koperasi pada umumnya. Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan organisasi berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan azas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena didalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa : Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan. Koperasi disini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi adalah sebagai organisasi atau lembaga modern yang mempunyai tujuan, sistem pengelolaan, tertib organisasi dan mempunyai azas serta sendi-sendi dasar.

Secara umum yang disebut koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dibidang perekonomian, beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha dibidang ekonomi. Koperasi mempunyai tujuan yang berorientasi pada kebutuhan para anggotanya, sama halnya dengan Koperasi Sumber Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam yang merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan

untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan prinsip koperasi.

Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam merupakan koperasi berbadan hukum, yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Dimana pinjaman tersebut dibagi menjadi empat jenis yaitu : Pinjaman Produktif, Pinjaman Kesejahteraan, Pinjaman Darurat dan Pinjaman Khusus. Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam melakukan penghimpunan dana dari para anggota dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan cadangan dan simpanan donasi. Dana yang dihimpun akan dipergunakan untuk meningkatkan permodalan yang nantinya akan disalurkan kepada anggota maupun masyarakat dalam bentuk kredit.

Perkembangan ekonomi yang begitu cepat membuat masyarakat lebih kritis dalam berfikir untuk mengikuti perkembangan informasi ekonomi. Salah satu informasi ekonomi yang di gunakan adalah informasi keuangan. Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam adalah salah satu pihak yang menyediakan informasi keuangan tersebut, yaitu berupa laporan keuangan yang digunakan Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam yang bersangkutan untuk melaporkan keadaan dan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk dapat menjaga efektivitas kinerja keuangan dari perusahaan dibutuhkan suatu bentuk alat komunikasi yang memberikan informasi tentang kondisi perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Analisis atas laporan keuangan dan interpretasinya pada hakekatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas keadaan keuangan Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam dan potensi atau kemajuannya melalui laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan mencakup penerapan berbagai alat dan teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran dan hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian tujuan analisis laporan keuangan adalah mengkonversikan data menjadi informasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam analisis laporan keuangan sebagai alat *forecasting* mengenai kondisi dan kinerja keuangan dimasa mendatang. Ada beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam melakukan suatu analisis, dimana salah satunya adalah analisis rasio. Analisis rasio merupakan salah satu dari teknik analisis yang dapat memberikan petunjuk yang menggambarkan kondisi Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam terutama dalam finansialnya. Analisis rasio dapat menjelaskan hubungan antara variable-variabel yang bersangkutan dan dipakai sebagai dasar untuk menilai kondisi tertentu.

Analisis rasio keuangan merupakan metode analisis yang sering dipakai karena merupakan metode yang paling cepat untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi tersebut. Dengan mengetahui kinerjanya, Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam akan dapat melakukan perkiraan keputusan apa yang diambil guna mencapai tujuannya. Hal tersebut karena suatu badan usaha koperasi

akandapat berusaha agar menjadi badan usaha yang modern. Analisis rasio keuangan pada koperasi ini akan menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos-pos tertentu dengan pos lainnya yang dilaporkan. Dalam hal ini analisis rasio keuangan pada Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam akan menggali informasi dari laporan neraca dan laporan hasil usahanya. Analisis rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan koperasi adalah analisis berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi yang digunakan adalah aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan hasil mengenai analisis keuangan yang menggunakan rasio. Berikut ini merupakan salah satu penelitian yang menunjukkan hasil analisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang digunakan koperasi.

Penelitian Rahayu Ambarwati yang berjudul Evaluasi Kinerja KPRI Muara Surakarta Periode 2004-2008 menggunakan Analisis Rasio Keuangan berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.Kukm/V/2009 diperoleh hasil yang menunjukkan secara keseluruhan bahwa berdasarkan analisis rasio, rasio lancar (*Current ratio*) sebesar 438,45% (*Quick Ratio*) sebesar 1298,77% rasio kas (*cash ratio*) sebesar 194,91% rasio total hutang terhadap total aset 28,39%, rasio total hutang terhadap modal sendiri 39,64%, kemampuan menghasilkan laba *Net*

*Profit Margin* 25,13% *Return on Asset (ROA)* 2,96%, *Rentabilitas modal sendiri (Return on Equity atau ROE)* 4,14%. *Assets Turn Over (ATO)* 0,12% kali, *Rasio Perputaran Piutang* 0,17 kali.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dimana penelitian Rahayu Ambarwati dilakukan di KPRI Muara Surakarta pada tahun 2004-2008. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam pada tahun 2015-2017. Penelitian ini juga meneliti rasio keuangan seperti yang dilakukan oleh Rahayu Ambarwati tetapi tidak meneliti rasio cepat (*Quick Ratio*), rasio kas (*Cash Ratio*) dan juga transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota yang tidak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/per/M.KUKM/XII/2009.

Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam merupakan salah satu badan usaha yang telah lama berdiri sejak tahun 1996 dan melakukan kegiatan usaha yang bergerak dalam simpan pinjam. Dimana pinjaman tersebut dibagi menjadi empat jenis yaitu : Pinjaman produktif, pinjaman kesejahteraan, pinjaman darurat dan pinjaman khusus.

Mengingat pentingnya laporan keuangan koperasi bagi pihak yang berkepentingan, maka diperlukan analisis rasio untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi yang sebenarnya pada Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam. Oleh karena itu penulis terdorong untuk mengukur kinerja keuangan Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam dengan menggunakan analisis rasio berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi yang digunakan adalah aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam dengan membandingkan teori dengan praktek yang akan disajikan melalui skripsi dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut Mohammad Nazir masalah ialah :**“Timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal, atau fenomena, adanya kemenduaan arti *ambiguity*, adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antar kegiatan antar fenomena baik yang telah ada ataupun yang aka nada.”**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam yaitu : **Bagaimana kinerja keuangan pada Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam dengan menggunakan analisis berdasarkan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi pada Tahun 2015-2017 ?<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Mohammad Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Kesepuluh Chalia Indonesia, jakarta, 2014, hal. 96

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam dengan menggunakan analisis rasio yang berdasarkan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi pada Tahun 2015-2017.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mnegembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai analisis laporan keuangan pada Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam.
2. Bagi Koperasi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk membandingkan rasio keuangan pada laporan keuangan masa yang akan datang sehingga kinerja anggota koperasi menajdi lebih baik.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk refrensi penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam penelitian dibidang yang sama.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Latin *cooperere* yang dalam Inggris menjadi *cooperation* berarti “bekerja bersama”, *co* berarti bersama dan *operation* berarti “bekerja” atau “berusaha” (*to operate*). Koperasi adalah sebuah perusahaan dimana orang-orang berkumpul bukan untuk menyatukan uang atau modal melainkan sebagai akibat kesamaan kebutuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang atau, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibanding sebelum bergabung dengan koperasi (UU No.12 Tahun 1967).

Menurut Tiktik Sartika Partomo :

**Koperasi adalah suatu perkumpulan dan sejumlah orang yang bergabung secara suka rela untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, melalui penyetoran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian resiko serta manfaat yang wajar dari usaha, dimana para anggotanya berperan secara aktif”.**<sup>2</sup>

Penjenisan koperasi diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang

---

<sup>2</sup> Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Cetakan Pertama: Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal 12.

manamenyebutkanbahwajeniskoperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengandemikian,sebelumkitamendirikankoperasiharusmenentukansecara jelaskeanggotaandankegiatanusaha.Dasar untukmenentukanjeniskoperasi adalahkesamaanaktivitas,kepentingandankebutuhanekonomianggotanya (UU No.25 Tahun 1992, Pasal16).

### 2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut ketentuan UU No. 17 tahun 2012 Bab XI Pasal 83 koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan).

Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu :

1. **Koperasi Konsumen.**
2. **Koperasi Produsen.**
3. **Koperasi Jasa.**
4. **Koperasi Simpan Pinjam.<sup>3</sup>**

Dengan uraian penjelasan di atas sebagai berikut :

#### 1. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

#### 2. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

---

<sup>3</sup> **Ibid**, hal 38

### 3. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

### 4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

## **2.1.3 Permodalan Koperasi Kredit**

Seperti halnya badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi menurut beberapa buku terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

### 1. Modal Sendiri

Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

#### a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota hal ini terjadi pada saat awal masuknya menjadi anggota dalam koperasi. Dan simpanan pokok ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota dalam koperasi tersebut dan besarnya jumlah simpanan pokok yang dibayar oleh setiap anggota adalah sama.

#### b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya setiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya.

c. Simpanan khusus/lain-lain, misalnya: simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), dan deposito.

d. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

e. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat.

2. Modal pinjaman

Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:

a. Anggota dan calon anggota

b. Koperasi lainnya dan/atau anggota yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi

c. Bank dan Lembaga Keuangan

- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sumber lainnya.

#### **2.1.4 Prinsip Prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku dimana saja dan kapan saja. Prinsip-prinsip koperasi menurut undang-undang No. 17 Tahun 2012 Bab III pasal 6 tentang perkoperasian, yaitu:

Koperasi melakukan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan manfaat koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan tingkat internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi

sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Adapun tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

## **2.2 Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan. Pada setiap perusahaan bagian keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan. Dengan berfungsinya secara baik bagian keuangan membuat kinerja keuangan yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan akan tersaji dengan baik. Sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Dalam analisis informasi keuangan, setiap aktivitas bisnis harus dianalisis secara mendalam baik oleh manajemen maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah manajemen, pemilik, kreditur, investor, penyalur, karyawan, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum.

Beberapa penulis mengemukakan definisi-definisi yang berbeda mengenai laporan keuangan dan diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut V. Wiratna Sujarweni, **“Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi laba yang digunakan perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan guna mencapai tujuan perusahaan”**.<sup>4</sup>

Menurut Bantu Tampubolon dan Halomoan Sihombing, **“Laporan keuangan adalah laporan yang dibuat secara sistematis oleh bagian pembukuan pada akhir periode akuntansi yang dapat dijadikan sumber informasi keuangan suatu perusahaan bagi pihak intern maupun ekstern”**.<sup>5</sup>

Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan keuangan lebih luas lagi dilakukan satu tahun sekali. Disamping itu, dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut.

Menurut Rudianto laporan keuangan pada koperasi terdiri dari 4 laporan yaitu:

- 1. Perhitungan hasil usaha**
- 2. Neraca**
- 3. Laporan arus kas**
- 4. Laporan promosi ekonomi anggota.**<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> V. Wiratna Sujarweni, **Sistem Akuntansi**, Edisi Pertama Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal 7.

<sup>5</sup> Bantu Tampubolon dan Halomoan Sihombing, **Akuntansi Keuangan**, Edisi Revisi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2007, hal 30.

<sup>6</sup> Rudianto, **Akuntansi Koperasi**, Edisi Kedua: Erlangga, 2010, hal. 61

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa laporan keuangan koperasi merupakan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh para pengurus koperasi dalam satu periode akuntansi sebagai bentuk evaluasi kinerja koperasi.

### **2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Seperti diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang disusun sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik dan manajemen perusahaan. Disamping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam maupun pihak luar perusahaan yang memiliki kepentingan kepada perusahaan.

Menurut SFAC No. 4 dalam buku Hery tujuan laporan keuangan untuk organisasi yang bukan pencari laba (*non-profit organization*) adalah sebagai berikut:

- 1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya (aktiva) perusahaan.**
- 2. Untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada publik.**
- 3. Untuk menilai bagaimana manajemen melakukan aktivitas pembiayaan dan investasi.**
- 4. Memberikan informasi tentang sumber daya (aktiva), kewajiban, dan kekayaan bersih perusahaan, serta perubahannya.**
- 5. Memberikan informasi tentang kinerja organisasi.**
- 6. Memberikan informasi tentang kemampuan organisasi melunasi kewajiban jangka pendeknya.**
- 7. Membuat penjelasan dan penafsiran manajemen.<sup>7</sup>**

---

<sup>7</sup> Hery, **Teori Akuntansi**, Edisi Pertama: Kencana, 2009, hal. 97



Sedangkan menurut Samryn, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. **Membuat keputusan investasi dan kredit. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membuat keputusan investasi atau keputusan kredit tanpa harus membuat lebih dari satu laporan keuangan untuk satu periode akuntansi.**
2. **Menilai prospek arus kas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai potensi arus kas dimasa yang akan datang.**
3. **Melaporkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, dan perusahaan-perusahaan didalamnya.**
4. **Melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas para pemilik.**
5. **Melaporkan kinerja dan laba perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur prestasi manajemen dengan selisih antara pendapatan dan beban dalam periode akuntansi yang sama.**
6. **Menilai likuiditas, solvabilitas, dan arus kas dana. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan arus dana.**
7. **Menilai pengelolaan dan kinerja manajemen.**
8. **Menjelaskan dan menafsirkan informasi keuangan.**<sup>8</sup>

### 2.2.3 Keterbatasan Laporan Keuangan

Kita menyadari bahwa laporan keuangan disusun sedemikian ruapa sehingga terlihat sempurna dan meyakinkan. Namun dibalik itu semua ada beberapa ketidaktepatan terutama dalam jumlah yang telah kita susun akibat adanya berbagai faktor. Contohnya banyak pendapat pribadi yang masuk, ataupunilaian berdasarkan nilai historis. Masalah seperti ini disebut sebagai keterbatasan dalam menyusun laporan keuangan.

---

<sup>8</sup> Samryn, **Pengantar Akuntansi**, Edisi IFRS: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.

Laporan keuangan belum dapat dikatakan mencerminkan keadaan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan adanya hal-hal yang belum atau tidak dicatatkan dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adanya kontrak-kontrak penjualan atau pembelian yang telah disetujui. Kemudian, ada hal-hal yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka seperti reputasi, prestasi manajer dan lainnya.

Setiap laporan keuangan yang disusun pasti memiliki keterbatasan tertentu. Menurut Kasmir ada beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu:

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (*historis*), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu.
2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu saja.
3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam melengkapi situasi ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta dan pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling rendah.
5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya.<sup>9</sup>

#### 2.2.4 Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, laporan keuangan disusun berdasarkan berbagai tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Artinya pembuatan

---

<sup>9</sup> Kasmir, **Analisis Laporan Keuangan**, Edisi Pertama: Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 16

dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

### 1. Pemilik

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yaitu untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini, untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode, dan untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.

### 2. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

### 3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi

pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Pihak kreditor juga perlu memantau kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya.

#### 4. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan, dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.

#### 5. Investor

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usahanya disamping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham.

#### 6. Pemasok dan Kreditor Lainnya

Pemasok dan kreditor lainnya berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan atas informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

### **2.2.5 Bentuk dan Teknik Analisis laporan keuangan**

Sebelum melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan langkah-langkah atau prosedur tertentu. Langkah atau prosedur ini diperlukan agar urutan proses analisis mudah dilakukan.

Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan menurut Amran Manurung dan Halomoan Sihombing adalah:

1. **Memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Mencakup pemahaman tentang bidang usaha yang diterjuni oleh perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan perusahaan.**
2. **Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Mencakup informasi mengenai *trend*; perubahan teknologi; perubahan selera konsumen; tingkat bunga, tingkat inflasi dan pajak.**
3. **Mempelajari dan me-*review* laporan keuangan. Langkah ini adalah untuk memastikan laporan keuangan menggambarkan data keuangan yang relevan.**
4. **Menganalisis laporan keuangan. Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut (bila perlu disertai rekomendasi).<sup>10</sup>**

Menurut Amran Manurung dan Halomoan Sihoming, “Metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu metode analisis Horizontal (dinamis) dan metode analisis Vertikal (statis)”.<sup>11</sup>

Menurut Jumingan menyatakan bahwa teknik analisis laporan keuangan terdiri dari:

1. **Analisis perbandingan neraca, laporan laba rugi dan laporan laba yang ditahan**
2. **Analisis perubahan modal kerja**
3. **Analisis tren dari rasio unsur-unsur neraca dan data operasi**
4. **Analisis persentase perkomponen**
5. **Analisis rasio yang memperlihatkan hubungan beberapa unsur neraca**
6. **Analisis perbandingan dengan rasio industri**

---

<sup>10</sup>**Ibid.**, hal. 26

<sup>11</sup>**Ibid.**, hal. 27

7. Analisis perubahan pendapatan netto atau analisis perubahan laba bruto
8. Analisis titik impas atau analisis *break-event point*<sup>12</sup>

Sedangkan teknik analisa menurut Munawir yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Analisa Perbandingan Laporan Keuangan
2. *Trend*
3. Laporan dengan persentase per komponen (*Common Size Statement*)
4. Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja
5. Analisa Sumber dan Penggunaan Kas (*Cash Flow Statement Analysis*)
6. Analisa Rasio
7. Analisa Perubahan Laba Kotor (*Gross Profit Analysis*)
8. Analisa *Break Event Point*<sup>13</sup>

## 2.3 Kinerja

### 2.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam setiap organisasi selalu mengharapkan bahwa kinerja dari para karyawan organisasi haruslah baik dan selalu meningkat, terutama kinerja keuangan organisasi tersebut. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kinerja kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis atau masalah yang serius.

---

<sup>12</sup> Jumingan, *Op Cit*, hal. 43

<sup>13</sup>S. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Keempat, Cetakan Ketiga Belas Liberty, Yogyakarta, 2014, hal. 36

Menurut Wibowo, **“Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi”**.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Husaini Usman: **“Kinerja ialah hasil kerja dan kemajuan yang dicapai seorang dalam bidang tugasnya.”**

### **2.3.2 Tujuan Penilaian Kinerja**

Penilaian kinerja seringkali didasarkan pada laporan keuangan. Kinerja keuangan suatu perusahaan biasanya tercermin dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu biasanya disusun dalam periode atau siklus akuntansi yang menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam periode tertentu dan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut dianalisis lebih lanjut sehingga diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

Menurut Munawir tujuan penilaian kinerja perusahaan, yaitu:

- 1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.**
- 2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik dari kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.**

---

<sup>14</sup>Wibowo, Manajemen Kinerja, Edisi Kedua: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.<sup>15</sup>

## 2.4 Alat Ukur Kinerja Keuangan

### 2.4.1 Pengertian Analisis Rasio

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio.

Menurut Munawir analisis Rasio adalah **”Future oriented”** atau **berorientasi dengan masa depan, artinya bahwa dengan analisa rasio dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha dimasa yang akan datang”**.<sup>16</sup>

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

### 2.4.2 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan

---

<sup>15</sup> S. Munawir, **Op. Cit.**, hal. 31

<sup>16</sup> **Ibid.**, hal.106



Menurut Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan, keterbatasan analisis rasio keuangan antara lain:

1. Sangat sulit mendapatkan rata-rata industri yang digunakan sebagai pembanding yang tepat untuk perusahaan besar yang mengoperasikan beberapa divisi yang berbeda pada industri yang sangat berlainan.
2. Bagi perusahaan yang menargetkan kinerja keuangan tinggi, patokan terbaik seharusnya adalah rasio keuangan yang sangat baik.
3. Inflasi menyebabkan distorsi besar pada neraca, nilai yang tercatat dalam neraca sering kali sangat berbeda dari nilai yang sebenarnya.
4. Perbedaan praktek operasi dan akuntansi dapat menyebabkan distorsi dalam perbandingan. Metode penilaian persediaan dan penyusunan dapat mendistorsikan perbandingan diantara perusahaan.
5. Sebenarnya sukar menetapkan apakah suatu rasio baik atau buruk.
6. Perusahaan juga mempunyai sejumlah rasio yang kelihatannya baik sedangkan rasio lainnya buruk sehingga sulit untuk membuat kesimpulan apakah secara keseluruhan perusahaan baik atau buruk.<sup>17</sup>

### 2.4.3 Analisis Rasio Keuangan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M. KUKM/XII/2009 kinerja suatu koperasi dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio yang terbagi dari berbagai aspek, yaitu: aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas dan kemandirian dan pertumbuhan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis rasio berdasarkan kinerja keuangannya saja, tidak termasuk kinerja non-keuangan (aspek manajemen).

---

<sup>17</sup>Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan, **Manajemen Keuangan**, Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2015, hal.116

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengelola koperasi dalam mengukur tingkat kinerja suatu koperasi baik itu Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi, Koperasi Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi Pegawai Republik Indonesia dan lain sebagainya.

Analisis rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan koperasi adalah analisis berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M. KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi yang digunakan adalah aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.

**Aspek permodalan meliputi:**

1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total *Asset*.
2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko.
3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri.

**Aspek kualitas aktiva produktif meliputi:**

1. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan.
2. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan.
3. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah.
4. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan.

**Aspek efisiensi meliputi:**

1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto.
2. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor.
3. Rasio efisiensi pelayanan.

**Aspek likuiditas meliputi:**

1. Rasio Kas.
2. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

**Aspek kemandirian dan pertumbuhan meliputi:**

1. Rasio Rentabilitas *Asset*.
2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri.
3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan.

**Aspek jati diri koperasi meliputi:**

**1. Rasio partisipasi bruto.**

**2. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA).<sup>18</sup>**

A. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total *Asset*

Rasio modal sendiri terhadap total *asset* digunakan untuk menghitung antara modal sendiri terhadap total *asset*. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara modal sendiri koperasi yang berasal dari simpanan anggota pada tahun yang bersangkutan dengan total *asset*.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

B. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko untuk menghitung kemampuan koperasi dalam memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara modal sendiri koperasi pada tahun yang bersangkutan dengan pinjaman diberikan yang berisiko.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko} \\ = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\% \end{aligned}$$

C. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

---

<sup>18</sup>14/Per/M.KUKM/XII/2009, Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi.

Rasio kecukupan modal sendiri untuk menghitung sejauh mana kemampuan koperasi mengukur modal sendiri berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio ini membandingkan antara nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR (jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko).

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kecukupan Modal Sendiri} = \frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

D. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggotanya terhadap total volume pinjaman. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara volume pinjaman pada anggota dengan volume pinjaman.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman} \\ &\text{yang diberikan} \\ &= \frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\% \end{aligned}$$

E. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan untuk mengukur rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang

diberikan. Rasio ini membandingkan antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

*Rasio risiko pinjaman bermasala terhadap pinjaman yang diberikan*

$$= \frac{\text{Pinjaman bermasala}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

#### F. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah digunakan untuk mengukur cadangan tujuan risiko ditambah penyisihan penghapusan pinjaman terhadap pinjaman bermasalah. Rasio ini membandingkan antara cadangan risiko dengan pinjaman bermasalah.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

*Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah*

$$= \frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

#### G. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan digunakan untuk mengukur banyaknya pinjaman yang berisiko. Rasio ini membandingkan antara pinjaman yang berisiko dengan pinjaman yang diberikan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

*Rasio pinjaman risiko terhadap pinjaman bermasalah*

$$= \frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

#### H. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto dihitung dengan cara membandingkan antara beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota ditambah beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

*Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto*

$$= \frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

#### I. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor dihitung dengan cara membandingkan antara beban usaha dengan SHU (Sisa Hasil Usaha) kotor.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor} = \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

#### J. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan cara membandingkan antara biaya karyawan dengan volume pinjaman.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Pelayanan} = \frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

#### K. Rasio Kas

Rasio Kas dihitung dengan cara membandingkan antara kas ditambah dengan bank dengan kewajiban lancar.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

#### L. Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dihitung dengan cara membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

*Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima*

$$= \frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$$

#### M. Rasio Rentabilitas Asset

Rasio rentabilitas *asset* sendiri menghitung sejauh mana kemampuan koperasi menghasilkan laba bersih berdasarkan total aset. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara Sisa Hasil Usaha sebelum pajak dengan total asset koperasi.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rentabilitas Asset} = \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

N. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri menghitung sejauh mana kemampuan koperasi menghasilkan laba bersih berdasarkan modal sendiri. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara Sisa Hasil Usaha bagian anggota atau laba yang diperoleh dengan modal sendiri koperasi yang berasal dari simpanan anggota pada tahun yang bersangkutan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

O. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio Kemandirian operasional pelayanan dihitung dengan cara membandingkan antara partisipasi neto dengan beban usaha (beban usaha adalah beban usaha bagi anggota) ditambah beban perkoperasian.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan} \\ &= \frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\% \end{aligned}$$

P. Rasio Partisipasi Bruto



Rasio partisipasi bruto dihitung dengan cara membandingkan antara partisipasi bruto dengan partisipasi bruto ditambah pendapatan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Partisipasi Bruto} = \frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Q. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) dihitung dengan cara membandingkan antara PEA (PEA = MEPPP + SHU bagian anggota) dengan simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)} \\ & = \frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\% \end{aligned}$$

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah terletak pada sebuah Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam yang berlokasi di Jl. Galang No.44, Perdamaian, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20585.

Objek penelitian ini mengacu pada laporan keuangan Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio disini dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas dan kemandirian dan pertumbuhan. dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahun 2015-2017.

#### 3.2 Sumber Data Penelitian

Data merupakan faktor yang penting dalam melakukan sebuah penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Menurut Jadongan Sijabat, **“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara.”**<sup>19</sup>Data sekunder yang diperoleh dari perusahaan berupa data yang sudah diolah. Data sekunder

---

<sup>19</sup>Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 85

seperti profil perusahaan, struktur organisasi dan laporan pertanggungjawaban periode 2015-2017.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data tersebut adalah:

1. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data atau dokumen yang ada dalam koperasi seperti laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2015-2017 pada Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam yang digunakan untuk mendukung penulisan skripsi.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah informasi yang diperoleh dengan cara membaca dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang dibaca dari sumber-sumber tertentu. Dalam hal ini penulis mempelajari buku-buku literatur yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan skripsi yang disusun oleh penulis.

3. Metode wawancara

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan, diperoleh dengan cara wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang dapat memberi informasi yang diperlukan dalam objek penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan menanyakan sejarah koperasi, struktur organisasi dan pembagian tugas.

### 3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis kinerja keuangan pada Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam yaitu analisis rasio, dengan menganalisis laporan keuangan periode tertentu, yaitu dengan membandingkan suatu pos dengan pos yang lainnya. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 14/Per/M. KUKM/XII/2009 untuk mengukur kinerja keuangan koperasi adalah sebagai berikut:

#### 3.4.1 Permodalan

##### 3.4.1.1 Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

$$\text{Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

**Tabel 3.1.**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 X < 20	25	6	1.50
20 X < 40	50	6	3.00
40 X < 60	100	6	6,00
60 X < 80	50	6	3.00
80 X 100	25	6	1,50

**Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M. KUKM/XII/2009.**

#### 3.4.1.2 Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

*Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko*

$$= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

**Tabel 3.2.**  
**Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman**  
**Diberikan yang Berisiko**

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilaidalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
100	100	6	6,0

**Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009**

#### 3.4.1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri

$$\text{Rasio Kecukupan Modal Sendiri} = \frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

- a) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

**Tabel 3.3.**  
**Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri**

<b>Modal (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
4	0	3	0,00
4 < X 6	50	3	1.50
6 < X 8	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

**Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M. KUKM/XII/2009**

### 3.4.2 Kualitas Aktiva produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan
- Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan
- Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.
- Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Pinjaman Bermasalah terdiri dari:

A. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :

- 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
- 2) melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; atau
- 3) melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau

b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :

- 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
- 2) melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :

a. Pinjaman belum jatuh tempo



Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.

b. Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

B. Pinjaman yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

C. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau;
2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

### 3.4.2.1 Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

*Rasio Volume pinjaman pada anggota ter adap volume pinjaman yang diberikan*

$$= \frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan standar berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
25			
25 < X 50	0	10	0,00
	50	10	5,00
50 < X 75	75	10	7,50
	100	10	10,00
> 75			

**Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009**

### 3.4.2.2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan

*Rasio risiko pinjaman bermasala ter adap pinjaman yang diberikan*

$$= \frac{\text{Pinjaman bermasala}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

a. menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

- 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
- 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
- 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)

b. hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{50 \% XPKL + 75 \% XPDR + (100 \% XPM)}{\text{Pinjamanyangdiberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- 1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

**Tabel 3.5.**  
**Standar Perhitungan RPM**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
40 < x 45	10	5	0,5
30 < x 40	20	5	1,0
20 < x 30	40	5	2,0
10 < x 20	60	5	3,0
0 < x 10	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

**Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009**

### 3.4.2.3 Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

*Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan*

$$= \frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

**Tabel 3.6.**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko**

<b>Rasio Pinjaman Berisiko Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

**Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009**

### 3.4.3 Kualitas Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

- a) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
- b) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor
- c) Rasio efisiensi pelayanan

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

### 3.4.3.1 Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

*Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto*

$$= \frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut

- a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 3.7.**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto**

<b>Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
100	0	4	1
95 $x < 100$	50	4	2
90 $x < 95$	75	4	3
0 $x < 90$	100	4	4

**Sumber:** Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### 3.4.3.2 Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

$$\text{Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor} = \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut

- a. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

**Tabel 3.8.**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU kotor**

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
60 < x < 80	50	4	2
40 < x < 60	75	4	3
0 < x < 40	100	4	4

**Sumber:** Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### 3.4.3.3 Rasio Efisiensi Pelayanan

$$\text{Rasio Efisiensi Pelayanan} = \frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.

- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilai.

**Tabel 3.9.**  
**Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
5	100	2	2,0
5 < x 10	75	2	1,5
10 < x 15	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

**Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009**

#### 3.4.4 Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar
- Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

##### 3.4.4.1 Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar

*Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar*

$$= \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih

kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.

b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

**Tabel 3.10.**  
**Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
10	25	10	2,5
10 < x 15	100	10	10
15 < x 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

**Sumber:** Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

#### 3.4.4.2 Rasio Pinjaman Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima

*Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima*

$$= \frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian



**Tabel 3.11.**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan Terhadap Dana yang Diterima**

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 x < 70	50	5	2,50
70 x < 80	75	5	3,75
80 x < 90	100	5	5

**Sumber:** Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### 3.5.5. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

#### 3.5.5.1 Rasio Rentabilitas Aset

$$\text{Rentabilitas Aset} = \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

**Tabel 3.12.**  
**Standar Perhitungan Untuk Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
5	25	3	0,75
5 < x 7,5	50	3	1,50
7,5 < x 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### 3.5.5.2 Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 3.13.**  
**Standar Perhitungan Untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3 x < 4	50	3	1,50
4 x < 5	75	3	2,25
5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### 3.5.5.3 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

$$\text{Kemandirian Operasional Pelayanan} = \frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 3.14.**  
**Standar Perhitungan Untuk Rasio Kemandirian Operasional**

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
100	0	4	0
> 100	100	4	4

**Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009**

### 3.5.6. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto

adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

### 3.5.6.1 Rasio Partisipasi Bruto

$$\text{Rasio Partisipasi Bruto} = \frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian.

**Tabel 3.15.**  
**Standar Perhitungan Untuk Rasio Partisipasi Bruto**

<b>RasioPartisipasiBruto (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
< 25	25	7	1,75
25 x < 50	50	7	3,50,
50 x < 75	75	7	5,25
75	100	7	7

**Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009**

### 3.5.6.2 Rasio Promosi Ekonomi Anggota

$$\begin{aligned}
 & \text{RasioPromosiEkonomiAnggota (PEA)} \\
 & = \frac{PEA}{\text{SimpananPokok} + \text{SimpananWajib}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian.

**Tabel 3.16.**  
**Standar Perhitungan Untuk Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

<b>Rasio PEA (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
< 5	0	3	0,00
5 < x 7,5	50	3	1,50,
7,5 < x 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3

**Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009**

Setelah rasio dihitung, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 14/Per/M. KUKM/XII/2009 untuk menyimpulkan tingkat kinerja keuangan Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam. Dan dari hasil kinerja keuangan yang diperoleh, dapat dilihat bagaimana kemajuan keuangan koperasi setiap tahunnya yaitu tahun 2015-2017, apakah kinerja keuangan Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam meningkat atau menurun.

### **3.6 Penetapan Kesehatan Koperasi**

Dalam melakukan penilaian kinerja keuangan pada Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam, maka aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100 karena aspek non keuangan (aspek manajemen) tidak dianalisis dan bobot skor aspek manajemen adalah 15 maka

nilai dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 85 . Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.17.**  
**Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen**

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		-Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	6	
		-Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang beresiko	6	
		-Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		-Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan	10	
		-Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan	5	
		-Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah	5	
		-Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan	5	

3	Efisiensi			10
		-Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto	4	
		-Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	4	
		-Rasio efisiensi pelayanan	2	
4	Likuiditas			15
		-Rasio Kas	10	
		-Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	15	
5	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		-Rasio Rentabilitas Asset	3	
		-Rasio Rentabilitas Modal Sendiri	3	
		-Rasio Kemandirian Operasional dan Pelayanan	4	
6	Jati diri Koperasi			10
		-Rasio Partisipasi Bruto	7	
		-Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3	
		Jumlah		85

**Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009**



Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 6 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 3.5.1.s/d 3.5.6., diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.18.**  
**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP**

<b>SKOR</b>	<b>PREDIKAT</b>
68 x <85	SEHAT
51 x <68	CUKUP SEHAT
34 x <51	KURANG SEHAT
17 x <34	TIDAK SEHAT
<17	SANGAT TIDAK SEHAT

**Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009**